



**PEMDA DIY KUCURKAN RP 246 M**

## Bantuan Jadup untuk 76.201 KK Terdampak Corona

**YOGYA (MERAPI)**- Pemda DIY akan kucurkan anggaran sebesar Rp 246 Miliar lebih dalam penanganan bencana Covid-19. Dana itu diperuntukkan untuk menyokong 3 bidang bantuan yakni, pada kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan social safety net (jaring pengaman sosial).

Hal ini diungkapkan Sekda DIY, Baskara Aji pada rapat bersama Komisi A DPRD DIY, Senin (13/4) di Gedung DPRD DIY. "Penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi, ini yang paling besar, kemudian penyediaan social safety net," ujarnya.

Dijelaskan, penanganan dampak ekonomi akan dieksekusi paling akhir dan warga terdampak akan diberikan insentif serta bantuan jatah hidup melalui Dinas Sosial DIY. Kemudian pengusaha juga diajak turun tangan untuk menangani usaha-usaha yang terdampak COVID-19.

"Hari ini kita berikan insentif kepada pengusaha untuk usaha yang terdampak COVID-19," imbuhnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Untung Sukaryadi \*Bersambung ke halaman 9



MERAPAHULAN YAN

Rapat Sekda DIY bersama DPRD membahas penanganan corona di DIY.

---

**Bantuan** .....

menambahkan, bantuan jatah hidup (jadup) akan diberikan pada 76.201 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 di wilayah Yogyakarta.

Bantuan diberikan selama 2 bulan dengan nilai Rp 625 ribu per Kepala Keluarga (KK) dengan asumsi 4 orang dan bantuan dapat memenuhi gizi dapat terpenuhi.

"Sasaran miskin yang masuk data kemiskinan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan yang belum pernah tersasar BMT dan PKH, termasukutamakan keluarga difabel miskin dan orang tua telantar kategori hidup sendiri," jelas Untung.

Dikatakan, pihaknya juga akan mengembangkan padat karya di Desa dan Kelurahan dengan membentuk satuan kerja (satgas) di tingkat Desa atau Kelurahan yang juga akan membantu dalam pengecekan dan verifikasi data orang yang membutuhkan bantuan. "Kabupaten atau kota ikut mengintervensi data-data siapa saja yang layak menerima bantuan," tutupnya.

Sementara itu, ribuan pelaku wisata di Kabupaten Gunungkidul terkena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan sektor pariwisata di wilayah ini lumpuh, sehingga disarankan membuka peluang usaha lainnya.

Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul Hary Sukmono Senin mengatakan dari 42 destinasi yang ada di Gunungkidul melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 3.635 orang.

"Mereka terkena dampak pandemi COVID-19 karena saat ini sektor pariwisata di Gunungkidul ditutup total, otomatis tidak ada kegiatan ekonomi," kata Hary.

Ia mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pendataan terhadap pelaku wisata yang terdampak. Selanjutnya sesuai ketentuan dari pemerintah pusat, diarahkan untuk mendapatkan kartu prakerja dan pelatihan sesuai yang diminati. "Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, kami koordinasi dengan dinas tenaga kerja," katanya seperti dilansir *Antara*.

Ia memprediksi estimasi kehilangan peredaran uang sampai akhir Mei mendatang dari jasa wisata diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Sehingga bila kondisi pandemi COVID-19 masih berlanjut, maka sampai Desember nanti perkiraannya bisa mencapai lebih dari Rp 500 miliar.

Hary menyebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat, untuk Maret sampai Mei mendatang merupakan masa tanggap darurat. Kemudian pada Juni hingga Desember yakni masa pemulihan. Sedangkan selama satu tahun pada 2021 nanti, yakni masa normalisasi.

Hary menyarankan supaya para pelaku wisata ini bisa tetap survive melewati masa pandemi ini, supaya mencari peluang usaha baru guna mencukupi kebutuhan ekonominya.

"Ikuti anjuran pemerintah, kami berusaha untuk bisa menyelamatkan sektor pariwisata. Pelaku wisata kami sarankan mencoba peluang usaha, coba usaha lain untuk masa tanggap darurat ini. Selain itu sabar dan berdoa agar segera berlalu masa pandemi ini," katanya.

Sementara itu, Bidang Pemasaran Pokdarwis Gunung Api Purba Nglangeran, Kecamatan Patuk, Heru Purwanto mengatakan ada lebih dari seratus orang dari anggota pokdarwisnya yang terdampak ekonomi karena penutupan destinasi sejak Maret lalu.

Heru mengatakan para pelaku wisata saat ini beralih profesi berkebutuhan dan bertani untuk mencukupi kebutuhan.

"Sampai sejauh ini belum ada insentif yang diberikan dari pemerintah. Namun ada arahan supaya melakukan pengisian data untuk mendapatkan kartu prakerja dan pelatihan," katanya.

(C-4)-a

Sambungan halaman 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005